

**PERENCANAAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DI DESA NGATA BARU
KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI**

M. SYUKUR

e-mail: syukurpacopori79@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini terkait perencanaan partisipatif masyarakat di Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih dan dokumentasi. Analisis data mendasarkan teori Ericson yang terdiri dari tiga aspek, yaitu partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Ngata Baru masih rendah, khususnya pada tahap musrenbang desa. Faktor yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, khususnya terkait pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penyampaian usulan/masukan oleh masyarakat banyak yang belum terealisasi, sehingga nampak pada tahap pelaksanaan pembangunan tidak sesuai keinginan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga infrastruktur, karena kurangnya pemahaman masyarakat untuk memelihara infrastruktur/ program hasil pembangunan, di samping . kurangnya kesadaran pemanfaatan program hasil pembangunan yang sesuai peruntukannya, mengingat minimnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Pemerintahan desa, dan Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral pembangunan nasional sebagai upaya mengarahkan masyarakat pada peningkatan kesejahteraan di daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berintikan penyelenggaraan otonomi daerah yang menegaskan bahwa “otonomi daerah ialah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Bertitik tolak dari penjelasan undang-undang tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha perubahan dari suatu keadaan menuju kondisi yang lebih baik dengan melibatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dan melibatkan unsur penyelenggara ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pelaksanaan pembangunan dituntut unsur perencanaan yang lebih aspiratif sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Seiring semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa memberikan semangat baru perencanaan pembangunan terutama di desa. Regulasi tersebut mengatur sistem perencanaan yang bersifat *top down* (dari atas ke bawah) serta perencanaan yang bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas) untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi. Penciptaan wadah partisipasi oleh pemerintah adalah dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang merupakan perencanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pelaksanaan tahunan berikutnya.

Perkembangan desa mengalami perubahan yang mendasar sejak kehadiran kolonialisme yang membawa pemerintahan modern di desa. Kondisi tersebut telah merombak sejarah

panjang hasil buah karsa dan karya perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme ke arah individualistik (Alamsyah, M. Nur, 2011)

Penyelenggaraan Musrenbang dengan pola *bottom up* digunakan dan dilaksanakan tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Sedangkan ruang partisipasi masyarakat yang terbuka hanya ada di musrenbang Desa. Ini disebabkan pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Salah satunya adalah Desa Ngata Baru, dalam hal musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah unsur-unsur lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mewakili unsur masyarakat di desa, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan bagi kepentingan masyarakat Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

Permasalahan partisipasi masyarakat yang ada di Desa Ngata Baru yang di harapkan belum dapat memenuhi tujuan dan keinginan masyarakat. Isu menarik dalam proses musrenbang yang dilaksanakan di Desa Ngata Baru berkaitan dengan langkah dalam tahap perencanaan pembangunan, salah satunya adalah masyarakat termotivasi pada saat pra-musyawarah perencanaan pembangunan tersebut. Akan tetapi pada saat musyawarah perencanaan pembangunan Desa dilaksanakan sebagian masyarakat yang telah ditunjuk sebagai delegasi tidak termotivasi lagi untuk berpartisipasi untuk mengikuti musyawarah tersebut. Kemudian masih terbatasnya kesadaran masyarakat memelihara infrastruktur yang sudah ada. Terbatasnya pemahaman tentang pentingnya pemeliharaan infrastruktur program hasil pembangunan.

Selain itu, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menggunakan atau memanfaatkan program hasil pembangunan sebagaimana mestinya, sesuai dengan manfaat dan kegunaanya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di Desa Ngata Baru, seharusnya pemerintah yang di wakili oleh aparat dari Kecamatan/Kabupaten semestinya sering melakukan sosialisasi agar masyarakat paham dan mengerti arti pentingnya sebuah partisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat yang masih minim tersebut, semakin diperparah dengan adanya beberapa usulan, saran, masukan, ide dan kritik yang mereka sampaikan jarang sekali terealisasi, sehingga nampak pada tahap pelaksanaan pembangunan, banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak menunjukkan hasil, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat. Selain itu, masyarakat kurang paham dengan musyawarah perencanaan pembangunan itu sendiri serta fenomena yang terlihat juga menunjukkan keaktifan masyarakat hanya sampai pada pra-musyawarah perencanaan pembangunan saja, tahap selanjutnya masyarakat menunjukkan sikap yang kurang aktif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan partisipatif masyarakat di Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami dengan mendeskripsikan perencanaan partisipatif masyarakat di Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan sebagai cerminan dasar perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang ditetapkan peneliti adalah Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Jumlah informan dalam penelitian ini 5 orang yang terdiri dari aparat desa dan tokoh masyarakat. Teknik penarikan informan menggunakan *Purposive*. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Model interaktif dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Proses Perencanaan Partisipatif Masyarakat di Desa Ngata Baru

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Ngata baru bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati rencana kerja kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebelum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilaksanakan telah diawali dengan pelaksanaan pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Dusun/RT, dan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mempersiapkan rencana usulan pembangunan yang akan dibahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan pendapat Sumodiningrat (1999:69) bahwa untuk mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan maka diperlukan suatu strategi perencanaan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan idealnya tidak lagi diarahkan pada pola *top down* yang bersifat mobilisasi seperti yang selama ini terjadi. Perencanaan pembangunan yang partisipatif lebih mencerminkan adanya demokrasi untuk terciptanya *good governance* (pemerintahan yang baik).

Sesuai dengan yang apa diungkapkan oleh Sumadiningrat diatas, bahwa Musrenbangdes merupakan sebuah strategi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah tidak lagi melaksanakan pembangunan yang berpola *top down* dengan memobilisasi masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah berdasarkan partisipasi masyarakat melalui aspirasi yang diberikan dalam wadah Musrenbangdes.

Konsep tersebut sesuai dengan tujuan sistem perencanan pembangunan nasional yaitu mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antara fungsi pembangunan pusat dan daerah serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan sekarang ini pemerintah melibatkan langsung masyarakat dengan cara menjaring aspirasi masyarakat dari bawah dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka melalui Musrenbang.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan didaerah melalui Musrenbang dimulai dengan Musrenbangdes, karena dalam melakukan perencanaan pembangunan tersebut dimulai melalui pemerintah paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu pemerintah kelurahan dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif (*participatory*) untuk menentukan prioritas pembangunan yang ada di lingkungan mereka.

Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Proses tersebut menunjukkan dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas. Pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien. Musrenbangdes merupakan bagian paling bawah dalam perencanaan yang bersifat *Bottom up* dimana pada prosesnya di dahului dengan pelaksanaan musyawarah ditingkat RT dan Dusun. Dalam musyawarah RT dan Dusun usulan-usulan prioritas yang dihasilkan dari masukan langsung masyarakat untuk kemudian dibahas dalam Musrenbang Desa.

Hasil pembahasan penelitian tentang perencanaan partisipasi masyarakat di Desa Ngata Baru dengan menggunakan teori Ericson yang terdiri dari partisipasi dalam tahap perencanaan,

partisipasi di dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi di dalam pemanfaatan diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Tahap Perencanaan (*Idea Planing Stage*).

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat melalui usulan, saran dan kritik serta kehadiran masyarakat dalam musyawarah. Peningkatan keaktifan dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Adapun partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah dengan cara melibatkan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi, yang merujuk pada dukungan masyarakat (keterlibatan masyarakat) dalam tahap perencanaan kegiatan mulai dari PraMusrenbangdes sampai pada pemanfaatan, serta adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang telah diadakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan di Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru masih sangat rendah, disebabkan minimnya informasi dan sosialisasi yang disampaikan oleh aparat desa. Bahkan ada kegiatan yang hanya di hadiri oleh aparat desa, anggota BPD dan tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh, padahal seharusnya seluruh masyarakat berhak hadir guna menyampaikan aspirasi mereka pada saat musrenbang desa.

Penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa rendahnya pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti rendahnya rasa memiliki dari masyarakat atas program pembangunan yang disusun, akibatnya keberlanjutan (*sustainability*) dari program yang dilaksanakan tidak terwujud. Program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya dan munculnya biaya transaksi (*transaction cost*) yang sangat mahal karena masyarakat kurang memahami tujuan dari program pembangunan sehingga seringkali muncul penolakan atas program yang dilaksanakan.

Adisasmita (2006:42) mengatakan bahwa bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dalam implementasi diprogram/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi. Dengan ketidakikutsertaan masyarakat dalam musrenbang desa sangat berpengaruh terhadap program yang telah dilaksanakan kerana program tidak berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Masalah lain menunjukkan bahwa ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Ngata Baru hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah, kadang tidak digubris (direalisasikan) oleh pemerintah desa, mekanisme perencanaan mulai dari pramusrenbang hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan masih sangat rendah, karena tidak adanya keseriusan pemerintah

desa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme perencanaan pembangunan maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program pembangunan dengan turut serta melibatkan seluruh masyarakat Desa Ngata Baru.

2. Partisipasi dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk melaksanakan program pembangunan di daerah diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai pencerminan semangat rasa kebersamaan, dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam ruang lingkup pemerintahan merupakan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat sebagai warga negara dalam proses pelaksanaan pembangunan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Adapun yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pada penelitian ini yaitu keterlibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu kegiatan, yang merujuk pada partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan ide-ide yang dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan. Serta peran serta masyarakat dalam memberikan bantuan berupa tenaga, uang dan barang/jasa.

Menurut Adi (2007:27) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap assesment, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk itu masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri.
2. Tahap alternatif program atau kegiatan. Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
3. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kebijakan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaan dilapangan.
4. Tahap evaluasi (termasuk evaluasi input, process, dan hasil).dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan biasa dilakukan, bahkan saran dan kritik untuk membangun, juga sudah sering dilakukan, walaupun saran dan kritikan tersebut kurang mendapat respon yang cukup baik dari pemerintah desa. Tetapi apa yang dipahami peneliti bahwa masyarakat tetap berusaha untuk selalu optimis dan berharap agar suatu saat nanti, apa yang diinginkan masyarakat dapat terealisasi, sehingga masyarakat bisa lebih peduli untuk menjaga program hasil pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan

yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan.

Salah faktor yang menyebabkan sehingga partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan kurang direspon masyarakat, karena aspirasi yang mereka sampaikan pada saat pra musyawarah perencanaan pembangunan sebagian besar tidak terealisasi, dan ini bukan pertama kalinya usulan tersebut tidak terealisasikan. Maka tidaklah salah kalau masyarakat beranggapan bawa partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan “partisipasi masyarakat”. Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Sesuai hasil wawancara peneliti dengan salah seorang masyarakat Desa Ngata Baru, bahwa keterlibatan masyarakat hanya sebatas pada pra musyawarah perencanaan pembangunan desa (Pramusrenbangdes), itu pun belum tentu usulan yang kami ajukan bisa terealisasi, karena tahun-tahun sebelumnya masih banyak aspirasi masyarakat yang tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan masyarakat merasa apatis dan tidak percaya lagi.

Menurut peneliti bahwa rendahnya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang di Desa Ngata Baru tahun 2018, karena tidak adanya keseriusan pemerintah untuk memberikan bantuan yang telah tertulis dalam kesepakatan bersama. Sehingga masyarakat cenderung apatis terhadap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Selain itu adanya kecenderungan tingkat kehadiran stakeholders penting dalam perencanaan pembangunan seperti kader pembangunan, tokoh adat, dan tokoh pemuda relatif rendah, serta tingkat keaktifan peserta relatif rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta yang pernah mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan bahwa kehadiran peserta dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut semata-mata hanya memenuhi undangan saja, sehingga kehadirannya lebih banyak sebagai pendengar.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan dalam penelitian ini adalah tentang keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan yang telah selesai dikerjakan, dengan merujuk pada peran serta masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang telah selesai dikerjakan, serta kepedulian masyarakat untuk mempergunakan sesuai dengan manfaatnya untuk kepentingan bersama.

Menurut peneliti bahwa, dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan, akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan penataan program pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pembangunan selanjutnya. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat diharapkan terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program pembangunan yang disusun sesuai dengan aspirasinya. Selain itu juga meningkatkan rasa memiliki masyarakat (*sense of belonging*) terhadap program

pemanfaatan yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi mereka dalam program pembangunan tersebut, yang pada akhirnya dapat terwujud pembangunan yang efisien dan efektif.

Broady dan Hedley (Adi, 2003:170) melihat bahwa dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat, suatu organisasi harus mendorong berkembangnya provisi dari komunitas (*communities provision*), konsultasi komunitas, kerja sama komunitas, kemandirian dalam manajemen lembaga swakelola, dan kontrol masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil pembangunan menunjukkan bahwa, sikap masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan masih sangat rendah. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan menjaga infrastruktur/program hasil pembangunan masih belum menunjukkan sikap yang serius. Ini juga dibuktikan dengan informasi yang diperoleh peneliti dengan salah seorang masyarakat, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat untuk menjaga program pembangunan masih sangat jauh dari harapan. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk merawat serta menjaga program pembangunan masih sangat rendah.

Untuk mendapatkan hasil perencanaan pembangunan daerah yang baik, tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, sehingga mereka dapat merasa ikut bertanggung jawab dan merasa memiliki program-program pembangunan yang jelas akan sangat menguntungkan bagi pelaksanaannya.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Ngata Baru Kecamatan Sigi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Keadaan ini dilihat dari tahapan perencanaan yang terlihat aktif saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa didominasi perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa serta tokoh-tokoh masyarakat saja. Masyarakat tidak berperan aktif pada tahap perencanaan, karena tidak mendapatkan undangan pada saat pelaksanaan musyawarah, sehingga pada saat pengambilan keputusan tidak mewakili aspirasi masyarakat pada umumnya.

Begitu pula dengan kesadaran masyarakat dalam tahapan pelaksanaan pembangunan juga masih sangat rendah. Indikasi hal ini terlihat dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang hampir seluruhnya dikerjakan oleh pemerintah desa secara sepihak. Masyarakat desa hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan di desa. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Ngata Baru untuk menjaga infrastruktur yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara infrastruktur/program hasil pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukminto, 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intersensi Komunitas*, Jakarta: LP Fakultas Ekonomi Indonesia.
- , 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan Fisip UI Press*.
- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Alamsyah, M. Nur, 2011. Memahami Perkembangan Desa di Indonesia. *Jurnal Academica Fisip Untad* Vol.03 No. 02 Oktober 2011 hlm. 647-659
- Miles, Mathew B dan Huberman A. Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta. UI Press.
- Sumodiningrat, Gunawan.1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah